



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

Palangka Raya, 18 Januari 2023

Kepada
Yth. Inspektur Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

di-
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor: 050 / 1040 / Sekre / DP3APPKB

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian penyusunan <i>Risk Register</i> Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk diketahui.

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19680717 199903 2 006

Risk Register (Daftar Risiko)

**Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan KB**



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen *Risk Register* (Daftar Risiko) Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Dokumen *Risk Register* (Daftar Risiko) ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Dinas P3APPKB khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyampaian Dokumen *Risk Register* (Daftar Risiko) ini dilaksanakan dan disusun semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Dinas P3APPKB Tahun 2022, baik di bidang pelayanan pada bidang teknis dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Dokumen *Risk Register* (Daftar Risiko) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Kalimantan Tengah semakin BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Palangka Raya, 18 Januari 2023



dr. LINA E. VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021 -2026	
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak 4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 5. Meningkatkan kualitas keluarga 6. Meningkatnya akseptor KB 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	
IKU Renstra OPD	IKU	
	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2026 81.98
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Penilaian Resiko Strategi OPD Dilakukan Berdasarkan Atas Tujuan Strategis Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan Sasaran Strategis Tujuan Strategis : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah IKU Strategis : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
Palangka Raya, 18 Januari 2023 Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. MINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 196807171999032006		

Kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah										
Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah										
Tahun Penilaian	2023										
Periode yang dinilai	2023										
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan										
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan/Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.23.08.20.01	Kepala Dinas	1. Ketidak pahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih mau melaporkan masalah di keluarga	eksternal	C	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal	1. Masyarakat 2. Perempuan 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	
			Keterlambatan penanganan tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan	RSO.23.08.20.02	Kepala Dinas	1. keterbatasan jumlah psikolog klinis 2. kurangnya sarana dalam penjangkuan kasus yang dilaporkan	1. eksternal 2. internal 3. internal dan eksternal	C	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal	1. Masyarakat 2. Perempuan 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPFMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Informasi Lain			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p>		
		Palangka Raya, 18 Januari 2023 Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19680717 199903 2 006	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia	ROO.23.08.20.06.01	Sekretaris	Belum terakomodirnya pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Internal	C	Tidak berkembangnya kapasitas ASN	1. ASN 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
			Pembatalan Diklat Teknis yang telah diajukan ASN	ROO.23.08.20.06.02		Kurangnya kuota kelas sebagai syarat pelaksanaan diklat	Internal	C		

- Keterangan**
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 - Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 - Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 - Kolom f diisi dengan Kode risiko
 - Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 - Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
 - Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 - Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 - Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 - Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
Informasi Lain			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi</p> <p>Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi</p>		
		<p>Palangka Raya, 18 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p>  <p>dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP/19680717 199903 2 006</p>	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama OPD : Dinas Pamberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Pamberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
 Urusan Pemerintahan : Pamberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 OPD yang Dinilai : Dinas Pamberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keuaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) tidak dipatuhi dan dilaksanakan beberapa Perangkat Daerah	ROO.23.08.20.01.01	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Konsep ARG belum masuk dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Internal	C	Target ARG dari tingkat Provinsi Kalteng tidak tercapai	1. Masyarakat/Perempuan 2. Tim Driver PUG 3. Semua SKPD Pelaksana 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
			Sumber Daya Manusia yang belum handal dalam menyusun dokumen PPRG	ROO.23.08.20.01.02	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Kurangnya pemahaman akan pentingnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Internal	C	Masing-masing Perangkat Daerah kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang responsif gender	1. Masyarakat/Perempuan 2. Tim Driver PUG 3. Semua SKPD Pelaksana 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB		
Sasaran Strategis	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan		Indikator
	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia
Informasi Lain			Target 2023 1 Dokumen
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Indikator : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
		Patangka Raya, 18 Januari 2023 Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19680717 199903 2 006	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
 Sasaran strategis OPD : Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akuntabel Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.23.08.20.02.C1 ROO.23.08.20.02.02	Kepala Bidang Data dan Informasi	Belum tersedianya operator penginputan SIGA di tingkat kabupaten/Kota Kurangnya pemahaman akan pentingnya penginputan data gender dan anak	Eksternal Eksternal	C C	Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA	1. Masyarakat 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak		
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)/Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2023
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
Informasi Lain			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>Kegiatan: Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p>		
		Palangka Raya, 18 Januari 2023 Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP.19680717 199903 2 006	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	ROO.23.08.20.03.01	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK (PPH)	Program KLA melibatkan banyak OPD dan Lintas Sektor, ada ego sektoral dan kendala koordinasi	Internal	C	Kabupaten/Kota tidak layak Anak	1. Masyarakat, khususnya tentang hak-hak anak tidak terlayani oleh pemerintah di Kab/Kota 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
			Jejaring antar lembaga layanan anak belum terkoordinasi dengan baik	ROO.23.08.20.03.02		Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pada lembaga layanan anak	Internal	C	Belum terpenuhi Hak Anak	1. Masyarakat, khususnya tentang hak-hak anak tidak terlayani oleh pemerintah di Kab/Kota

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan		
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator
	1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota lokasi khusus pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
			Target tahun 2023
			1 Kabupaten/Kota
			100 Orang
Informasi Lain			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator : 1. Jumlah Kabupaten/Kota lokasi khusus pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan 2. Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik		
			Palangka Raya, 18 Januari 2023 Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 196807171999032006

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keuaran	Risiko		Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	k	l	
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tidak ada situasi darurat	ROO.23.08.20.04.01	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Situasi Bencana/situasi Khusus Tidak bisa diprediksi	Eksternal	UC	Kegiatan tidak dapat terlaksana	Perempuan dan anak
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.23.08.20.04.02		Menunggu Surat Edaran (SE) Pemda tentang kejadian/situasi Darurat	Internal	C	Terdapat perempuan dan anak yang tidak mendapatkan bantuan	Perempuan dan anak

- Keterangan**
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/ sasaran kegiatan
 - Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 - Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 - Kolom f diisi dengan Kode risiko
 - Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 - Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
 - Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 - Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 - Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
 - Kolom l diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas keluarga		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)/Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023
	1 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK</p> <p>Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK</p>		
		<p align="right">Palangka Raya, 18 Januari 2023 Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p>  <p align="right">Dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 196807111999032006</p>	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan kualitas keluarga
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	<p>Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK</p> <p>Masih ada Baduta dan Balita yang <i>stunting</i></p>	<p>ROO.23.14.20.05.01</p> <p>ROO.23.14.20.05.02</p>	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	<p>Perangkat daerah terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan</p> <p>Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda</p>	<p>Internal</p> <p>Internal</p>	<p>C</p> <p>C</p>	<p>Informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta dan masyarakat</p> <p>Angka stunting masih tinggi</p>	<p>1. Anak Balita dan Baduta</p> <p>2. Masyarakat</p> <p>3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota</p>

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan		
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Perlindungan Perempuan/ Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
			Target tahun 2023
			1 Dokumen
			50 Layanan
Informasi Lain			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Perlindungan Perempuan</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p> <p>Indikator : 1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan. 2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</p>		
		<p>Palangka Raya, 18 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p>  <p>dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 196807111999032006</p>	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Ketuaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	ROO.23.08.20.07.01	Kepa:a UPT-PPA	Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan koran kekerasan terhadap perempuan	Internal	C	Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal	Masyarakat yang melaporkan
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA	ROO.23.08.20.07.02	Kepala UPT-PPA	Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan	Eksternal	C	Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal	Masyarakat yang melaporkan

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
 Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*
 Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis Pemda	: Meningkatkan Kesetaraan Gender
Tujuan Strategis OPD	: Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Tujuan Operasional OPD	:
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Dinas P3APPKB:				
1	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.23.08.20.01	4	4	16
2	Keterlambatan penanganan tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan	RSO.23.08.20.02	3	3	9
II	Risiko Operasional Sekretariat				
1	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia	ROO.23.08.20.06.01	3	3	9
2	Pembatalan Diklat Teknis yang telah diajukan ASN	ROO.23.08.20.06.02	4	4	16
III	Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan				
1	Kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) tidak dipatuhi dan dilaksanakan beberapa Perangkat Daerah	ROO.23.08.20.01.01	3	2	6
2	Sumber Daya Manusia yang belum handal dalam menyusun dokumen PPRG	ROO.23.08.20.01.02	4	4	16
IV	Risiko Operasional Bidang Data dan Informasi				
1	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akurat	ROO.23.08.20.02.01	3	3	9
2	Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.23.08.20.02.02	4	3	12
V	Risiko Operasional Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				
1	Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	ROO.23.08.20.03.01	4	4	16
2	Jejaring antar lembaga layanan anak belum terkoordinasi dengan baik	ROO.23.08.20.03.02	3	3	9
VI	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				
1	Tidak ada situasi darurat	ROO.23.08.20.04.01	3	3	9
2	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.23.08.20.04.02	4	3	12
VII	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas				
1	Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK	ROO.23.14.20.05.01	3	3	9
2	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting	ROO.23.14.20.05.02	4	4	16
VIII	Risiko Operasional UPT PPA				
1	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	ROO.23.08.20.07.01	4	3	12
2	Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA	ROO.23.08.20.07.02	2	3	6

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
 Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB
 Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Dinas P3APPKB:					
1	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.23.08.20.01	16	Kepala Dinas	1. Ketidak pahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di keluarga	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal
II	Risiko Operasional Sekretariat					
1	Pembatalan Diklat Iekmis yang telah diajukan ASN	ROO.23.08.20.06.02	16	Sekretaris	Kurangnya kuota kelas sebagai syarat pelaksanaan diklat	Tidak berkembangnya kapasitas SDM
III	Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan					
1	Sumber Daya Manusia yang belum handal dalam menyusun dokumen PPRG	ROO.23.08.20.01.02	16	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Kurangnya pemahaman akan pentingnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA
IV	Risiko Operasional Bidang Data dan Informasi					
1	Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.23.08.20.02.02	12	Kepala Bidang Data dan Informasi	Kurangnya pemahaman akan pentingnya penginputan data gender dan anak	Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA
V	Risiko Operasional Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak					
1	Pemahaman tentang Indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	ROO.23.08.20.03.01	16	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program KLA melibatkan banyak OPD dan Lintas Sektor, ada ego sektoral dan kendala koordinasi	Kabupaten/Kota tidak layak Anak
VI	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera					
1	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.23.08.20.04.02	12	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Menunggu Surat Edaran (SE) Pemda tentang kejadian/situasi Darurat	Terdapat perempuan dan anak yang tidak mendapatkan bantuan
VII	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas					
1	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting	ROO.23.14.20.05.02	16	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda	Angka stunting masih tinggi
VIII	Risiko Operasional UPT PPA					
1	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	ROO.23.08.20.07.01	12	Kepala UPT PPA	Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Tahun Penilaian		Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2023					
Tujuan Strategis		Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah					
Urutan Pemerintahan		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada*)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Dinas P3APPKB:						
1	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.23.08.20.01	Sosialisasi Pelayanan UPT PPA	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan Pemberian Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Layanan UPT PPA	Kepala Dinas	Februari - Oktober
II	Risiko Operasional Sekretariat						
1	Pembatalan Diklat Teknis yang telah diajukan ASN	ROO.23.08.20.06.02	Belum ada	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun Dokumen Rencana Diklat Teknis secara Kolektif Minimal terdiri atas 10 ASN	Sekretaris	Nopember
III	Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan						
1	Sumber Daya Manusia yang belum handal dalam menyusun dokumen PPRG	ROO.23.08.20.01.02	Sosialisasi Penyusunan ARG	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pertemuan Koordinasi Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Juni
IV	Risiko Operasional Bidang Data dan Informasi						
1	Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.23.08.20.06.02	Rapat Koordinasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penerbitan Instruksi/Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalteng Kepada Bupati/Walikota untuk Penginputan SIGA secara Akurat dan Tepat Waktu	Kepala Bidang Data dan Informasi	Maret
V	Risiko Operasional Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak						
1	Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	ROO.23.08.20.03.01	Bimtek/ capacity building	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Adanya MOU antar OPD/Lintas Sektor dan unsur Pimpinan Daerah untuk pelaksanaan KLA	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Nopember
VI	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera						
1	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.23.08.20.04.02	Pembagian Paket Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyesuaian Jumlah Paket dengan target minimal 30% dari korban perempuan dan anak yang terkena bencana	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Juli
VII	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas						
1	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting	ROO.23.14.20.05.02	Sosialisasi 1000 HPK	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rangkaian Pemberian edukasi pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) untuk mendukung pencegahan stunting	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Februari-September
VIII	Risiko Operasional UPT PPA						
1	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	ROO.23.08.20.07.01	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemberian Informasi SOP Pelayanan sesuai kewenangan masing-masing daerah melalui Rapat Koordinasi UPT PPA se Kalimantan Tengah	Kepala UPT PPA	Oktober

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah						
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan Pemberian Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Layanan UPT PPA	Sosialisasi, Penyebaran Leaflet, Pemasangan Spanduk, Balho Videotron serta medsos Dinas P3APKKB	Kepala Dinas	Februari - Oktober		
2	Menyusun Dokumen Rencana Diklat Teknis secara Kolektif Minimal terdiri atas 10 ASN	Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data pegawai	Sekretaris	Nopember		
3	Pertemuan Koordinasi Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Juni		
4	Penerbitan Instruksi/Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalteng Kepada Bupati/Walikota untuk Penginputan SIGA secara Akurat dan Tepat Waktu	Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota untuk pendampingan penginputan SIGA	Kepala Bidang Data dan Informasi	Maret		
5	Adanya MOU antar OPD/Lintas Sektor dan unsur Pimpinan Daerah untuk pelaksanaan KLA	Sosialisasi	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Nopember		
6	Penyesuaian Jumlah Paket dengan target minimal 30% dari korban perempuan dan anak yang terkena bencana	Peningkatan Jumlah Paket Bantuan	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Juli		
7	Rangkaian Pemberian edukasi pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) untuk mendukung pencegahan stunting	Sosialisasi dan KIE terkait pencegahan stunting	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Februari-September		
8	Pemberian Informasi SOP Pelayanan sesuai kewenangan masing-masing daerah melalui Rapat Koordinasi UPT PPA se Kalimantan Tengah	Rapat koordinasi Pelayanan UPTD PPA	Kepala UPT PPA	Oktober		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

Matriks Analisis Risiko							
Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	Hampir Pasti	5					
	kemungkinan Besar	4					
	Mungkin	3					
	Jarang	2					
	Sangat jarang	1					

Level Risiko		
Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Hampir Pasti	15-25	Merah
kemungkinan Besar	10-14	Orange
Mungkin	5-9	Kuning
Jarang	3-4	Hijau
Sangat jarang	1-2	Biru